

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKJ) disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan untuk menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023.

Banjarbaru, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru,



dr. JUHAI TRIYANTI AGUSTINA, M.MKes  
Pembina Utama Muda  
NIP 197408182006042025

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN LAKIP	4
1.3 DASAR HUKUM	5
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	7
1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	8
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP)	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 RENCANA STRATEGIS 2023-2026	14
2.2 TUJUAN	18
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 CAPAIAN KINERJA	25
3.2 REALISASI ANGGARAN	92
BAB IV PENUTUP	94
4.1 KESIMPULAN	94
4.2 LANGKAH STRATEGIS	96
LAMPIRAN	ix
Perjanjian Kinerja	
IKU	
SOP	
SK TIM SAKIP	

## DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Hal
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru	8
Gambar 3.1 Kegiatan Pendistribusian Obat Dan Vaksin Ke Puskesmas Se Kota Banjarbaru tahun 2023	30
Gambar 3.2 Kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) Tahun 2023	37
Gambar 3.3 Kelas Ibu Hamil	37
Gambar 3.4 Gerakan Bumil Sehat	38
Gambar 3.5 Pelaksanaan Jaminan Persalinan	38
Gambar 3.6 Kegiatan Pendampingan Tim Ahli ( Spesialis Kandungan dan Spesialis Anak ) ke Puskesmas	39
Gambar 3.7 Grafik Penyebab Kematian Bayi Di Kota Banjarbaru Tahun 2023	41
Gambar 3.8 Pelatihan USG bagi dokter Puskesmas	45
Gambar 3.9 Pendampingan dokter spesialis anak	46
Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan P2 ASI	46
Gambar 3.11 Pelaksanaan Kegiatan Home care	54
Gambar 3.12 Pelaksanaan Kegiatan Deteksi Dini Kesehatan	54
Gambar 3.13 Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi COVID 19	55
Gambar 3.14 Pelaksanaan Kegiatan UKOM dan Pelatihan	63
Gambar 3.15 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan PIRT	69
Gambar 3.16 Tangkapan Layar Laporan Komdat	75
Gambar 3.17 Pemberian PMT Balita Kurang dan PMT Pemulihan	80
Gambar 3.18 Kegiatan Aksi Bergizi Sekolah	81



## DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Hal
Tabel 1.1 Sebaran Tenaga Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023	9
Tabel 1.2 Status Akreditasi rumah Sakit Di Kota Banjarbaru tahun 2023	10
Tabel 1.3 Status Akreditasi Puskesmas Di Kota Banjarbaru Tahun 2023	10
Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Banjarbaru Tahun 2023	21
Tabel 2.2 Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023	22
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	24
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Prasarana UKP UKM Dalam Keadaan Baik, Kota Banjarbaru Tahun 2023	26
Tabel 3.3 Realisasi capaian kategori sarana Prasarana UKP UKM Dalam Keadaan Baik, Di Kota Banjarbaru Tahun 2023	26
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Sarana Prasarana UKP UKM Dalam Keadaan Baik Tahun 2019 sd. 2023	27
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	27
Tabel 3.6 Capaian Indikator Persentase Sarana Prasarana UKP UKM Dalam Keadaan Baik Tahun 2023 Dibanding Dengan Target RPJMD dan RPJMN	28
Tabel 3.7 Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kota Banjarbaru Tahun 2023	29
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Menurunnya Angka Kematian Ibu Di Kota Banjarbaru Th. 2023	32
Tabel 3.9 Distribusi Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2023	33
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Menurunnya Angka Kematian Ibu Di Kota Banjarbaru Th. 2019 Sd. 2023	34

Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Indikator Menurunnya Angka Kematian Ibu Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	34
Tabel 3.12	Capaian Indikator Angka Kematian Ibu Di Kota Banjarbaru Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Target RPJMD Dan RPJMN	34
Tabel 3.13	Anggaran Program Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Kota Banjarbaru Tahun 2023	35
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Bayi Di Kota Banjarbaru Th. 2023	40
Tabel 3.15	Distribusi Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2023	41
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Bayi Di Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023	42
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Indikator Angka Kematian Bayi Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	42
Tabel 3.18	Capaian Indikator Angka Kematian Bayi Di Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra	43
Tabel 3.19	Anggaran Yang Menunjang Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) Th. 2023	44
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Indikator Angka Kesakitan Di Kota Banjarbaru Th. 2023	47
Tabel 3.21	Rekapitulasi Kunjungan Orang Dengan masalah kesehatan/ pasien baru Tahun 2023 pada fasyankes	49
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Indikator Angka Kesakitan Di Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023	49
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Indikator Angka Kesakitan Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	50
Tabel 3.24	Capaian Indikator Angka Kesakitan Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target RPJMD Dan RPJMN	50
Tabel 3.25	Anggaran Yang Menunjang Indikator Angka Kesakitan Th. 2023	51
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Indikator Persentase Puskesmas Yang Memiliki 9 (Sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan Di Kota Banjarbaru Th. 2023	56

Tabel 3.27	Validasi Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan Yang Dimiliki Puskesmas Di Kota Banjarbaru Tahun 2023, Standar Permenkes puskesmas 43 tahun 2019	57
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Indikator Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023	58
Tabel 3.29	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Puskesmas Yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	59
Tabel 3.30	Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target RPJMD Dan RPJMN	60
Tabel 3.31	Anggaran ProgramPenunjangPencapaian Indikator Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Th. 2023	61
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar Di Kota Banjarbaru Th. 2023	64
Tabel 3.33	Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU dan TPM yang memenuhi Standar Di Kota Banjarbaru Tahun 2023	65
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar Di Kota Banjarbaru TH. 2012 Sd. 2023	66
Tabel 3.35	Perbandingan Capaian Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	66
Tabel 3.36	Capaian Indikator Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar Di Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Renstra	67
Tabel 3.37	Anggaran Program Pencapaian Indikator Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM Di Kota Banjarbaru Th. 2023	67
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru Th. 2023	70

Tabel 3.39	Daftar Kebijakan Berwawasan kesehatan yang di Implementasikan di Kota Banjarbaru Tahun 2023	71
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023	72
Tabel 3.41	Perbandingan Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	72
Tabel 3.42	Capaian Indikator Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Rentra	73
Tabel 3.43	Anggaran Program/ Kegiatan Yang Menunjang Pelaksanaan Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru Th. 2023	73
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Gizi Kurang Di Kota Banjarbaru Th. 2023.	76
Tabel 3.45	Cakupan Penimbangan balita dan persentase Balita Gizi kurang (Wasting) tahun 2023 di Kota Banjarbaru	76
Tabel 3.46	Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Gizi Kurang Di Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023	77
Tabel 3.47	Perbandingan Prevalensi Gizi Kurang Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	78
Tabel 3.48	Capaian Indikator Prevalensi Gizi Kurang Di Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Renstra	78
Tabel 3.49	Anggaran Program/ Kegiatan Yang Menunjang Prevalensi Gizi Kurang Di Kota Banjarbaru Th. 2023	79
Tabel 3.50	Capaian Kinerja Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Th. 2023	83
Tabel 3.51	Pengukuran Realisasi Indikator Nilai SAKIP Berdasarkan Hasil Evaluasi Tin Evaluator Pemerintah Kota Banjarbaru, Tahun 2022	84
Tabel 3.52	Capaian Kinerja Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023	84
Tabel 3.53	Pengukuran Realisasi Indikator Nilai SAKIP Berdasarkan Hasil Evaluasi Tin Evaluator Pemerintah Kota Banjarbaru, Tahun 2021 & 2022	85
Tabel 3.54	Perbandingan Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	85

Tabel 3.55	Capaian Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Renstra	86
Tabel 3.56	Anggaran Program/ Kegiatan Yang Menunjang Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Di Kota Banjarbaru Th. 2023	86
Tabel 3.57	Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Falitasi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Th. 2023	86
Tabel 3.58	Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitas Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023	89
Tabel 3.59	Perbandingan Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitas Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023	89
Tabel 3.60	Capaian Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Renstra	90
Tabel 3.61	Anggaran Program/ Kegiatan Yang Menunjang Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitas Di Kota Banjarbaru Th. 2023	90
Tabel 3.62	Alokasi Dana Untuk Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2022 dan 2023	92
Tabel 3.63	Alokasi Dana Program Untuk Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023	93

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebagai monitoring terhadap perjanjian kinerja yang telah disusun guna menilai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Tahun 2023 yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tertulis berisi kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri

merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah Kota Banjarbaru. Oleh sebab itu, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah diwajibkan membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan dijadikan pedoman untuk Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD sebagai Pedoman Kerja selama 5 tahun dan dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai program kerja tahunan. Demikian pula dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 ini merupakan program kegiatan tahunan yang berkaitan dengan Rencana Strategik SKPD yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 20 tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Penyusunan rencana kerja ini juga tentunya memperhatikan aspek-aspek strategis yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan seperti sumber



daya manusia kesehatan, sarana prasarana kesehatan yang cukup baik.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan orientasi dan menjadi dasar penilaian dalam rangka evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban Instansi Pemerintah yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Sesuai PP 8/ 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap Pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Dan sesuai dengan pasal 19 Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun laporan kinerja dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tertulis berisi kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, akan menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat sehingga terpenuhi nya isu strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mendukung



Visi Pemerintah Kota Banjarbaru mewujudkan Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera.

## 1.2 PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN LAPORAN KINERJA

### 1. Pengertian Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### 2. Tujuan Pelaporan Kinerja

- 1) Memberikan informasi kinerja secara terukur kepada pemberi mandate atas kinerja dan telah seharusnya dicapai.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 3. Manfaat Laporan Kinerja

- 1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*)
- 2) Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- 3) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
- 4) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

### 1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 berlandaskan kepada :

#### 1. Landasan Formil :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang DanaPerimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
  10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  13. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  14. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
  15. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
2. Landasan Materil
- a. Masukan, saran, pendapat dan aspirasi unit kerja serta Perangkat Daerah
  - b. Identifikasi masalah serta analisis terhadap pemecahan masalah.

## 1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

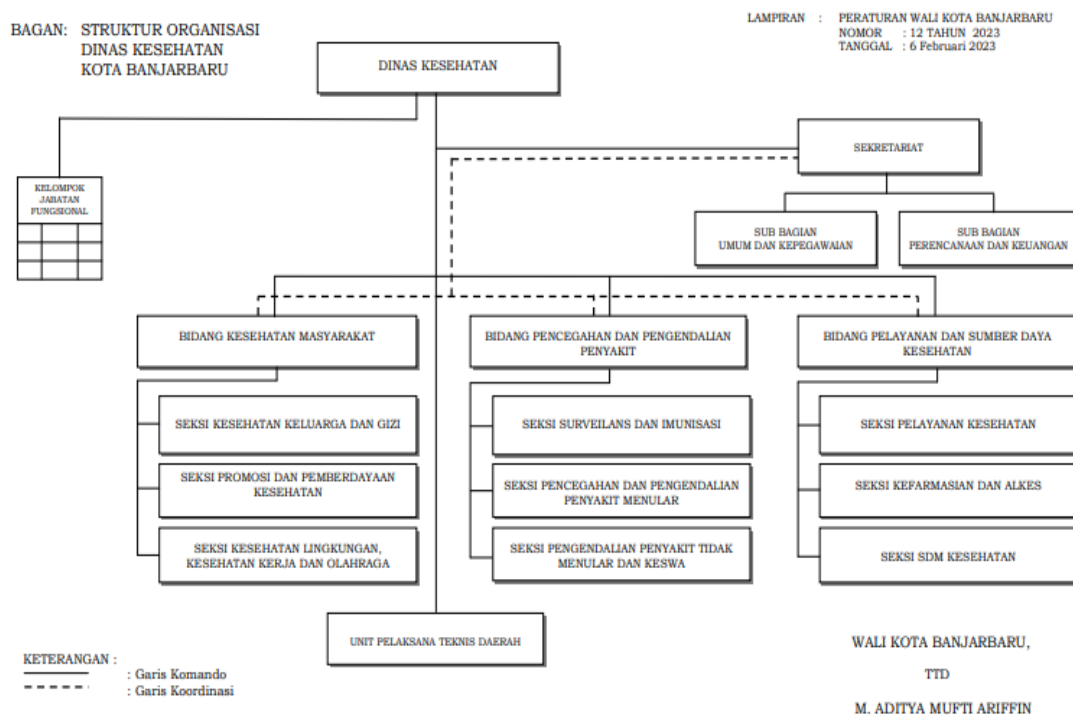
Atas dasar hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mempunyai unsur-unsur organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
  1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular;
  3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebagaimana dalam bagan berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru**



### 1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja per tahunnya.

Kemudian karena ditetapkan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026, maka disusun Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru 2021 – 2026 sehingga terjadi penyesuaian target kinerja tahunan. Sebagaimana tertera pada dokumen tersebut, maka aspek strategis

pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kota Banjarbaru, aspek-aspek tersebut antara lain:

#### 1. Aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seiring meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan meliputi, maka dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan guna menunjang operasional pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Selain jumlah petugas kesehatan kualitas dan kompetensi petugas juga harus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan bermutu.

Pada tahun 2023 jumlah tenaga kesehatan di wilayah Kota Banjarbaru terus meningkat, yaitu terdata sebanyak 3685 orang yang tersebar pada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjarbaru terlihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.1 Sebaran Tenaga Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023**

No	Rumpun SDM	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Medis	145	233	378
2.	Keperawatan	363	502	865
3.	Kebidanan	-	365	365
4.	Kefarmasian	42	153	195
5.	Kesehatan Masyarakat	31	73	104
6.	Kesehatan Lingkungan	24	47	71
7.	Gizi	7	64	71
8.	Keterampilan Fisik	19	18	37
9.	Keteknisian Medis	41	116	157
10.	Teknik Biomedika	75	180	255
11.	Tenaga Penunjang	36	35	71
12.				
	Total			<b>3685</b>

Sumber: Data SIDMK per 31 Desember 2023

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai

target pembangunan kesehatan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025.

## 2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka otonomi daerah untuk mendukung keterjangkauan pelayanan kesehatan secara adil, merata dan bermutu, pemerintah Kota Banjarbaru membuat kebijakan berdasarkan keputusan walikota nomor 33 tahun 2006 tentang pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas tanpa membedakan status sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu untuk peningkatan dan menjaga mutu pelayanan kesehatan pemerintah Kota Banjarbaru mendukung pelaksanaan Akreditasi Rumah sakit dan Puskesmas.

**Tabel. 1.2 :** Status Akreditasi Rumah Sakit Di Kota Banjarbaru Tahun 2023

No	Rumah sakit	Akreditasi		Keterangan
		Tahun	Status Akreditasi	
1.	RSD Idaman Kota Banjarbaru	2022	Paripurna	
2.	RS TNI AU Sjamsudin Noor	2023	Paripurna	
3.	RUMKIT Tk IV Guntung Payung	2022	Paripurna	
4.	RSU Mawar	2023	Utama	
5.	RS. Syifa Medika	2023	Paripurna	
6.	RS Al Mansyur Medika	-	-	
7.	RSU Permata Husada Banjarbaru	2023	Paripurna	
8.	RSU Nirwana	2023	Paripurna	
9.	RSI Sultan Agung Banjarbaru	2022	Paripurna	

Sumber : Data Bidang Pelayanan Kesehatan

**Tabel. 1.3 :** Status Akreditasi Puskesmas Di Kota Banjarbaru Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Akreditasi		Reakreditasi	
			Tahun	Status Akreditasi	Tahun	Status Akreditasi
1	Kecamatan Cempaka	Rawat Inap Cempaka	2018	Dasar	2023	Paripurna
2	Banjarbaru Selatan	Sungai Besar	2017	Dasar	2023	Utama
		Banjarbaru Selatan	2019	Madya	2023	Paripurna
3	Banjarbaru	Sungai Ulin	2019	Utama	2023	Utama

	Utara	Banjarbaru Utara	2017	Madya	2023	Paripurna
4	Landasan Ulin	Guntung Payung	2019	Madya	2023	Paripurna
		Guntung Manggis	2017	Dasar	2023	Paripurna
		Landasan Ulin Timur	-	-	-	-
5	Liang Anggang	Landasan Ulin	2019	Utama	2023	Paripurna
		Liang Anggang	2017	Madya	2023	Paripurna

Sumber : Data Bidang Pelayanan Kesehatan

### 3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Kegiatan pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru didukung dengan pembiayaan yang terdiri dari :

1. Belanja langsung : Rp. 62.824.247.828  
Dengan rincian :
  - APBD KOTA : Rp. 29.950.275.058
  - DAK Fisik : Rp. 3.374.811.600
  - DAK Non Fisik : Rp. 14.056.749.000
  - DAU Kesehatan : Rp. 13.737.357.170
  - Dana Inflasi : Rp. 1.705.055.000
2. Belanja Tidak langsung : Rp. 68.180.210.330

### 4. Aspek Wilayah

Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0–7 m (36,96%), 7-25 m (33,23%), 25-100 m (26,30%), dan 100-500 m (3,51%). Adapun kondisis fisik tanah yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi efektif pertumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah

Banjarbaru telah merupakan ibukota Provinsi, sebagai impian dr. Murdjani telah menjadi kenyataan seiring dengan pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru yang sedang dirintis sejak tahun 2009. Sekarang sebagian sudah mulai dipindahkan khususnya sekretariat.



Secara geografis, Banjarbaru merupakan penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar di Martapura, yaitu dengan jarak 35 km dari Banjarmasin dan 2 km dari Martapura. Secara astronomi terletak pada 03°25'40" – 03°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" – 114°55'25" Bujur Timur. Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 66 feet dpl, dengan wilayah relatif datar

Kota Banjarbaru berbatasan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kecamatan Martapura Kab. Banjar
- Timur berbatasan dengan kecamatan Karang Intan Kab. Banjar
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kab. Banjar
- Selatan berbatasan dengan kecamatan Bati-bati Kab. Tanah Laut

Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0–7 m (36,96%), 7-25 m (33,23%), 25-100 m (26,30%), dan 100-500 m (3,51%). Adapun kondisis fisik tanah yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi efektif.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru sepanjang setiap tahun cukup tinggi, hingga perhitungan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2022 kota Banjarbaru mencapai 2,71% (sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka 2023). Kota Banjarbaru yang identik sebagai kota pendidikan dimana terdapat berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyebabkan banyaknya pendatang yang berdomisili di kota ini untuk menuntut ilmu. Selain itu posisi Kota Banjarbaru yang cukup strategis baik secara administratif maupun akses ekonomi mendorong peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Banjarbaru mendorong perkembangan pembangunan perumahan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi dengan ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Pintu Gerbang Ibu Kota Negara.

## 1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menetapkan/merumuskan Perencanaan Kinerja yang merupakan dasar penyusunan laporan kinerja atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Melalui perjanjian kinerja dibentuklah komitmen atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kinerja tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kesinambungan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Guna mewujudkan perjanjian kinerja yang diperjanjikan, Dinas kesehatan Kota Banjarbaru telah melaksanakan 5 program, 21 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan rencana dan target kinerja yang telah disusun tahun 2023.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 50 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, sebagaimana di ubah Peraturan Walikota (PERWALI) Kota

Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Dinas Kesehatan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesehatan.
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian masalah kesehatan.
5. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian jaminan dan sarana kesehatan.
7. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas kesehatan.
8. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu;

**“ BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA ”**

Dalam upaya mewujudkan Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif, sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kota Banjarbaru diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Banjarbaru terdepan dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan dan dapat berdaya saing pada tingkat regional dan nasional maupun global. Visi pembangunan Kota Banjarbaru dirumuskan berdasarkan kerangka logis pencapaian. Setidaknya terdapat tiga pilar untuk mencapai visi Banjarbaru Juara yaitu :

- Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing berlandaskan nilai agama dan budaya:
- Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Inklusif;
- Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Tiga pilar pencapaian visi diharapkan dapat mewujudkan Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera (JUARA). Pilar pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing berlandaskan nilai agama dan budaya di indikasikan oleh kondisi masyarakat yang berkualitas dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Pilar kedua, pembangunan ekonomi berkualitas dan inklusif yaitu pembangunan tidak hanya berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga pada aspek pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Pilar terakhir adalah tata

kelola pemerintahan yang amanah yang diindikasikan oleh indeks reformasi birokrasi.

Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya. Perumusan Penjelasan Visi “**BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA**” (BANJARBARU JUARA) adalah sebagai berikut :

**MAJU** Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

**AGAMIS** Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi tenwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025

**SEJAHTERA** SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik.

## 2. Misi

Terdapat tiga misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2021-2026. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Adapun misi Kota Banjarbaru :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan Dengan Kearifan Lokal Dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

## 2.2 TUJUAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Tujuan SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

### 1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 1.1 Strategi

##### 1. Strategi S-O

- a. Menggunakan sumberdaya manusia/tenaga kesehatan, sarana prasarana dan anggaran secara efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan
- b. Memanfaatkan komitmen dari Pemerintah Daerah dan legislative dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bermutu dan terjangkau.
- c. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Melaksanakan kemitraan dengan lintas sector, dunia usaha, organisasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan bidang kesehatan

##### 2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan anggaran serta pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia/ tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SOP dan tata kelola manajemen pelayanan pada UPT Dinas Kesehatan.
  - c. Mengembangkan Sistem Informasi kesehatan
  - d. Membangun sarana pelayanan kesehatan sampai ke tingkat kelurahan
3. Strategi S-T
- a. Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan pembiayaan dari APBD.
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan
  - c. Advokasi kepada Pemerintah Daerah dan legislative dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
4. Strategi W-T
- a. Meningkatkan sarana prasarana dan pemenuhan tenaga kesehatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ber Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
  - d. Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga.

## 1.2 Kebijakan

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;



3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Hubungan antara arah kebijakan dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan

### **2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 telah ditetapkan dan dimuat dalam Buku Penetapan Kinerja Kota Banjarbaru.

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2024. Penetapan/perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Walikota Banjarbaru merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari bagian ini (terlampir). Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Program dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan**  
**Kota Banjarbaru Tahun 2023**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	100%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	7/1000 KH
		Angka Kematian Ibu (AKI)	108/100.000KH
		Angka Kesakitan	25%
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	100 %
4.	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan	99 %
5.	Meningkatnya Organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%
6.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang	7.5 %

Adapun program yang dilaksanakan dan anggaran pendukung untuk tercapainya kinerja indicator setiap sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Program Kegiatan Dan Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru**  
**Tahun 2023**

Program Kegiatan			Pagu Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	59.015.513.630
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	2.311.680.300
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	393.926.000
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	1.102.878.700
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	68.179.961.132

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Laporan kinerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan untuk mendukung Misi Kesatu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 yaitu “ *Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia*”.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO		KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75–100%	Baik
3	55–74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai RPJMD Kota Banjarbaru Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mengemban Misi ke satu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia” pada sasaran strategis :

- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran strategis ditetapkan Angka Harapan Hidup dan

- Menurunnya Angka Stunting dengan indikator Angka Prevalensi Stunting untuk itu maka disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, setidaknya terdapat 6 (Enam) sasaran program yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

1. Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar
5. Meningkatnya Organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan
6. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ESSELON II

**Sasaran 1:** Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu : **Persentase sarana prasarana Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam keadaan baik**

Indikator ini mempunyai makna pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan serta perlengkapan penunjang nya yang memadai dan sesuai standar pelayanan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Diharapkan dengan terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Indikator ini diukur dari jumlah penyelenggaraan sarana prasarana

yang dalam keadaan yang baik di bagi jumlah sarana prasarana yang diselenggarakan di kali seratus persen.

Adapun capaian Kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Persentase Sarana Prasarana UKP UKM Dalam Keadaan Baik**

**1. Perbandingan Realisasi dan Target**

Capaian kinerja indikator kinerja persentase sarana prasarana UKP dan UKM dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Prasarana UKP  
 UKM Dalam Keadaan Baik, Kota Banjarbaru Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukan realisasi capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana UKP UKM di Kota Banjarbaru di Kota Banjarbaru dalam keadaan baik dapat terealisasi 100%. Indikator ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori capaian kinerja **“Baik”**.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Capaian Kategori Sarana Prasarana UKP UKM  
 Dalam Keadaan Baik, Di Kota Banjarbaru Tahun 2023**

No	Kategori	Jumlah Puskesmas	Jumlah Yang memenuhi kategori	%
1	Obat dan Vaksin yang memenuhi standar Ketersediaan Obat	10	10	100
2	Alat Kesehatan	10	10	100

3	Bahan Medis Habis Pakai	10	10	100
4	Bangunan/Fasilitas Fisik Bangunan	10	10	100

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Indikator Persentase Sarana Prasarana UKP  
UKM Dalam Keadaan Baik Tahun 2021 sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik dilihat dari tahun 2021 telah dapat di capai dengan baik. Pelaksanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana UKP dan UKM mencapai target yang ditetapkan.

## 3. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota /Propinsi.

Capaian Indikator persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik di Kota Banjarbaru dibandingkan dengan kabupaten/ kota sekitar lainnya Kota Banjarbaru telah mencapai 100%.

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana  
Prasarana UKP UKM Dalam Keadaan Baik Di Kota Banjarbaru  
Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	100%	64%	95,45%	85,19%	89,09



#### 4. Perbandingan Kinerja Dengan Target Renstra.

Realisasi kinerja persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Persentase Sarana Prasarana UKP UKM  
Dalam Keadaan Baik Tahun 2023 Dibanding Dengan Target  
Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra
1.	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	100 %	100 %

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik tahun 2023 dengan target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tahun 2026 telah dapat dipenuhi yaitu 100%, namun pemenuhan kuantitas dan kualitas dari kondisi sarana dan prasarana ini masih tetap harus dilaksanakan untuk dapat mempertahankan kualitas pelayanan Kesehatan yang baik.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

**Tabel 3.7**  
**Anggaran Program Indikator Persentase Sarana Prasarana UKP**  
**UKM Dalam Keadaan Baik Kota Banjarbaru Tahun 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat <i>Kegiatan :</i> - Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26,410,280,830	23,902,104,191	90,50%
Jumlah		26,410,280,830	23,902,104,191	90,50%

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp. 26,410,280,830 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar 23,902,104,191 sebesar atau 90,50%. Tidak ada upaya refocusing anggaran sebagai Upaya pencapaian target indikator.

#### **6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut**

Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Pemetaan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang bertujuan keamanan, bermutu dan layak pakai serta efisien di sarana Pelayanan Kesehatan serta memudahkan untuk perencanaan, pengadaan, instalasi dan penerimaan, penggunaan dan penghapusan.
- Perencanaan Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana UKP UKM dengan kebutuhan pemenuhan program Kesehatan melalui dana DAK Kesehatan

### Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Masih minimalnya sumber daya untuk pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan baik dari segi anggaran & SDM yang mampu mengelola
- Ada beberapa Puskesmas yang kondisi listrik yang tidak stabil sehingga mempengaruhi sarana & prasarana kesehatan

### Rencana Tindak Lanjut

- Penyediaan sumber daya pemeliharaan sarana & prasarana
- Penyusunan perencanaan usulan penganggaran UPS sebagai pendukung prasarana di Fasilitas Kesehatan Jika mengalami kondisi Listrik yang tidak stabil.

### Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

- Adanya dukungan anggaran dari daerah dan dana pusat dalam pemenuhan kegiatan program
- Adanya Pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan secara berkala

Gambar 3.1  
Kegiatan Pendistribusian Obat Dan Vaksin Ke Puskesmas  
Se Kota Banjarbaru





## **Sasaran 2** : Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat

Pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu :

- a. Angka Kematian Ibu
- b. Angka Kematian Bayi
- c. Angka Kesakitan

Adapun capaian Kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut

### **a. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI)**

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain

Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$$

#### 1. Perbandingan Realisasi dan Target

Pencapaian indikator menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari target yang telah ditentukan yaitu 108 per 100.000 kelahiran hidup yaitu 86,67 per 100.000 kelahiran hidup telah mencapai kinerja 119,75% (kategori capaian kinerja “Sangat Baik”).

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Ibu  
Di Kota Banjarbaru Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	108	86,67	119,75%

Berdasarkan data laporan Bidang Kesehatan masyarakat Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru diketahui jumlah kematian ibu di Kota Banjarbaru pada tahun 2023 sebanyak 4 orang ibu. Berdasarkan penyebab

kematian ibu tertinggi sekitar 50 % (2 orang) adalah akibat perdarahan sisanya adalah pre eklamsi dan AFLP (Acut Faty Liver Preganncy), dapat dilihat pada tabel 3.9 .

Jumlah kelahiran hidup tahun 2023 terdata sebanyak 4615 orang sehingga dengan jumlah kematian ibu sebanyak 4 orang maka angka kematian ibu pada tahun 2023 ini menjadi 86,67/100.000 kelahiran hidup.

**Tabel 3.9**  
**Distribusi Penyebab Kematian Menurut Kecamatan**  
**Di Kota Banjarbaru Tahun 2023**

NO.	KECAMATAN	Penyebab Kematian			Jumlah Kematian Ibu
		Pre Eklampsia	Perdarahan	AFLP (Acut Faty Liver Preganncy)	
1.	Cempaka		1		1
2.	Banjarbaru Selatan				0
3.	Banjarbaru Utara	1			1
4.	Landasan Ulin				0
5	Liang anggang		1	1	2
Total		1	2	1	4

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Capaian kinerja pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 119,75% atau angka kematian semakin menurun dari 108/100.000KH pada tahun 2023 menjadi 86,67/100.000KH Angka kematian ibu ini sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 108/100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu pada tahun 2022 yaitu sebanyak 5 orang dan tahun 2023 menurun menjadi 4 orang.

Tabel 3.10  
Capaian Kinerja Indikator Menurunnya Angka Kematian Ibu  
Di Kota Banjarbaru Th. 2021 Sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Angka Kematian Ibu (AKI)	268/100.000 KH)	-45,87%	108/100.000 KH)	80 %	86,67/100.000 KH)	119,75 %

### 3. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten / Kota / Provinsi

Angka kematian ibu di Kota Banjarbaru dibandingkan dengan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tala Laut, Kota Banjarmasin dan tingkat provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah yaitu 86,67/100.000 KH.

Tabel 3.11  
Perbandingan Capaian Indikator Angka Kematian Ibu  
Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th.  
2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	86,67/100.000 KH	123/100.000 KH	158/100.000 KH	136/100.000 KH	145/100.000 KH

### 4. Perbandingan Kinerja Dengan Target Renstra.

Tabel 3.12  
Capaian Indikator Angka Kematian Ibu Di Kota Banjarbaru Tahun  
2023 Dibandingkan Dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RENSTRA
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	86,67/100.000 KH	108/100.000 KH

Pada tabel diatas dapat dilihat angka kematian ibu tahun



2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru .

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2023 sebesar Rp. 691.055.000 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 643.533.000 atau sebesar 93%. Tidak ada upaya refocusing anggaran sebagai upaya pencapaian target indikator.

Tabel 3.13  
Anggaran Program Yang Menunjang Indikator Angka Kematian Ibu Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>			
1.	<i>Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> <i>Subkegiatan</i>			
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	661.005.000	638.033.000	23.002.000
	- <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	30.000.000	5.500.000	24.500.000
	Jumlah	691.055.000	643.533.000	47.502.000



## 6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) antara lain yaitu :

1. Pendampingan Tim Ahli ( Spesialis Kandungan ) ke Puskesmas
2. OJT kasus kegawatdaruratan Ibu dan Anak bagi dokter, bidan dan perawat Puskesmas
3. Penguatan pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk ibu hamil dan bersalin pada fasyankes
4. Evaluasi pembentukan jejaring skrining layak hamil, ANC dan Stunting
5. Program Jampersal (Pelayanan Ibu Bersalin Resiko Tinggi yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan)
6. Pelatihan USG bagi dokter Puskesmas

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja

1. Persentase capaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil masih belum 100 %
2. Belum optimalnya pemakaian sistem penunjang pelaksanaan AMPSR (Aplikasi MPDN)
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut (Surveilans Respon) Belum maksimal

Rencana tindak lanjut

1. Kegiatan Pendampingan Tim Ahli ke Puskesmas tetap dilaksanakan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan AMPSR sebanyak 4 kali
3. Membentuk kelompok kerja penurunan AKI dan AKB di Puskesmas dan tim pengkaji kematian di RS pemerintah dan swasta secara bertahap
4. Melaksanakan ANC berkualitas ( Kualitas 10 T, Kuantitasnya 6

kl pemeriksaan)

5. Penguatan pemantauan pemberian dan konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil dan ibu bersalin
6. Meningkatkan penyelenggaraan kelas ibu hamil

Gambar 3.2  
Kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR)



Gambar 3.3 Kelas Ibu Hamil



Gambar 3.4 Gerakan Bumil Sehat



Gambar 3.5 Pelaksanaan Jaminan Persalinan



Gambar 3.6  
Kegiatan Pendampingan Tim Ahli ( Spesialis Kandungan dan  
Spesialis Anak ) ke Puskesmas



#### **b. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan

AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan

perawatan bayi baru lahir. Perhitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AKB = \frac{\text{Jumlah Kematian bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$$

### 1. Perbandingan Realisasi dan Target

Tabel 3.14  
Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Bayi  
Di Kota Banjarbaru Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kematian bayi (AKB)	/1000 KH	7	12,13	26,71%

Penurunan angka kematian bayi (AKB)/1.000 Kelahiran Hidup diperhitungkan dengan jumlah bayi meninggal saat proses kelahiran sampai dengan 11 bulan dibagi kelahiran hidup dalam 1 tahun x 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 indikator sasaran angka kematian bayi (AKB) ditargetkan dapat menurunkan menjadi 7/1000 kelahiran hidup, namun realisasi pada tahun 2023 tidak mencapai target yaitu 12,13 per 1000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian bayi pada tahun 2023 adalah 56 orang meningkat dari tahun 2022 yaitu sebanyak 32 orang.

Dari data yang diperoleh dari laporan kesehatan anak yang dihimpun Bidang Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru jumlah kematian bayi terbanyak ada di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara dan Liang Anggang yaitu sebanyak 16 orang atau 28,6% dari jumlah kematian dan terendah di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara sebesar 14,3 % atau 8 orang. Distribusi jumlah kematian menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

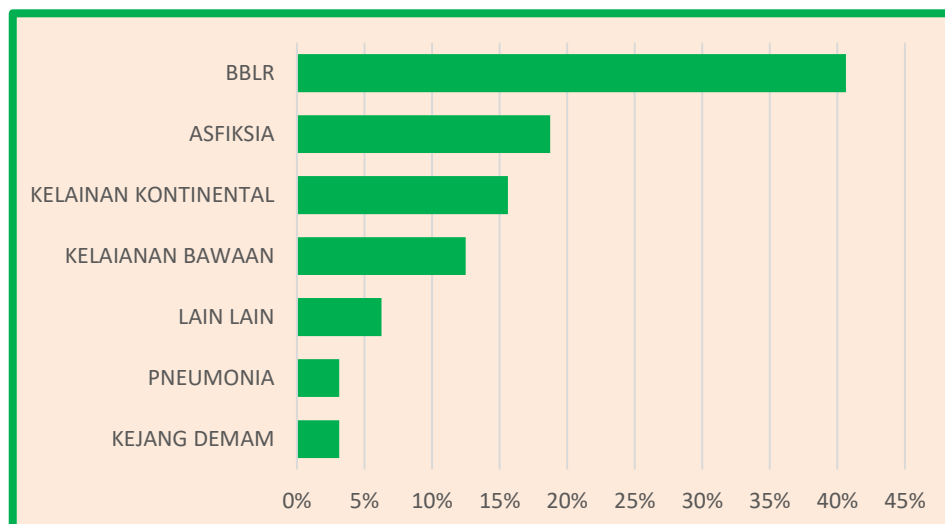


Tabel 3.15  
Distribusi Kematian Bayi Menurut Kecamatan  
Di Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	KELAHIRAN HIDUP (KH)	JUMLAH KEMATIAN BAYI
1.	Cempaka	567	8
2.	Banjarbaru Selatan	833	8
3.	Banjarbaru Utara	1.045	8
4.	Landasan Ulin	1.324	16
5.	Liang anggng	846	16
Total		4.615	56
Angka Kematian/1000 KH		12,13	

Dari jumlah 56 kematian bayi, 40,62% disebabkan oleh BBLR sebagai penyebab terbanyak, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.7  
Grafik Penyebab Kematian Bayi Di Kota Banjarbaru Tahun 2023



## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Tabel 3.16  
Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Bayi  
Di Kota Banjarbaru TH. 2021 Sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kematian bayi (AKB)	4,7/ 1000 KH	85,40 %	7/ 1000 KH	-5,88%	12,13/ 1000 KH	26,71 %

Dilihat dari angka kematian dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ini mengindikasikan angka kematian bayi meningkat. Secara absolut juga jumlah kematian di tahun 2023 lebih banyak yaitu 56 orang sedang tahun 2022 sebanyak 32 dan Tahun 2021 21 orang. Untuk itu strategi dan usaha dalam upaya penurunan angka kematian bayi di kota Banjarbaru harus terus ditingkatkan melalui beberapa kegiatan peningkatan upaya kesehatan secara menyeluruh.

## 3. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten / Kota / Provinsi.

Tabel 3.17  
Perbandingan Capaian Indikator Angka Kematian Bayi  
Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi  
Tahun 2023

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	12,13/ 1000 KH	14,3/ 1000 KH	10,2/ 1000 KH	8,2/1000 KH	12/ 1000 KH

Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) di beberapa kabupaten/kota yang mengelilingi Kota Banjarbaru ada yang lebih tinggi yaitu kabupaten Banjar, dan adapula yang lebih rendah yaitu di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut,

demikian pula perbandingan dengan angka kematian bayi Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah dari Kota Banjarbaru yaitu 11,7/1000 KH.

#### 4. Perbandingan Kinerja dengan target Renstra.

Tabel 3.18  
Capaian Indikator Angka Kematian Bayi Di Kota Banjarbaru  
Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra
1.	Angka Kematian bayi (AKB)	12,13 /1000 KH	7/1000 KH

Melihat capaian AKB tahun 2023 di Kota Banjarbaru 12,13/1000 KH masih belum mencapai target yang ditetapkan untuk akhir tahun Renstra Dinas Kesehatan 7/1000 KH.

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2023 pada indikator menurunkan Angka kematian bayi (AKB) didukung melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 92.202.250. Sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 79.452.250. atau 86,17%. Tidak ada upaya refocusing anggaran sebagai upaya pencapaian target indikator.



**Tabel 3.19**  
**Anggaran Program Yang Menunjang Indikator**  
**Angka Kematian Bayi Th. 2023**

N O	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARA N (Rp)
	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>			
1.	<i>Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan</i>			
	<i>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	<i>30.102.250</i>	<i>28.752.250</i>	<i>1.350.000</i>
	<i>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	<i>62.100.000</i>	<i>50.700.000</i>	<i>11.400.000</i>
	Jumlah	92.202.250	79.452.250	12.750.000

#### **6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut**

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain yaitu :

1. Pendampingan dokter spesialis anak
2. Pelatihan USG bagi dokter Puskesmas
3. Pengkajian Kematian Ibu dan Anak dan Surveilans Respon

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Masih ada terjadi pernikahan usia dini
2. Terlalu muda, terlalu tua dan terlalu dekat jarak kehamilan dan terlalu banyak anak (4T)
3. Terlambat mengambil keputusan, terlambat membawa ke fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan

Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intens kepada anak sekolah dan orang tua tentang pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi.
2. Kegiatan Pemeriksaan calon penganten di Puskesmas
3. Skrining anemia pada remaja putri
4. Pendampingan Tim Ahli ( Spesialis Anak) ke Puskesmas
5. Melaksanakan AMPSR sebanyak 4 kali

Dokumentasi kegiatan upaya yang telah dilakukan :

Gambar 3.8  
Pelatihan USG bagi dokter Puskesmas



Gambar 3.9  
Pendampingan dokter spesialis anak



Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan P2 ASI



### c. Indikator Angka Kesakitan

Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Adapun cara perhitungan dengan menghitung jumlah penduduk frngan keluhan Kesehatan du bagi jumlah penduduk di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk dg keluhan Kesehatan (kunjungan Pasien)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

#### 1. Perbandingan Realisasi dan Target

Tabel 3.20  
Capaian Kinerja Indikator Angka Kesakitan Di Kota Banjarbaru  
Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kesakitan	Persen	25	12,79	148,83%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Kinerja indikator penurunan angka kesakitan di Kota Banjarbaru dapat di

kategorikan “**Sangat Baik**”, hal ini dapat dilihat capaian tahun 2023 sebesar 148,83% dengan angka kesakitan sebesar 12,79%. Penurunan angka kesakitan tahun ini dapat melebihi dari angka kesakitan yang ditargetkan yaitu 25 %.

Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya tentunya merupakan faktor yang sangat menunjang keberhasilan ini diantaranya:

- Pemerataan pembangunan fasilitas pelayanan, setiap kecamatan memiliki Puskesmas yang telah memiliki rata-rata 2 Puskesmas dan 90 % Puskesmasnya telah terakreditasi.
- Selalu terpenuhinya sarana prasarana layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat dengan kondisi baik.
- Pemberian kesempatan pengembangan usaha kesehatan di Kota Banjarbaru sehingga semakin banyaknya fasilitas kesehatan swasta yang membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara mandiri
- Wilayah Kota Banjarbaru sebagai suatu perkotaan yang juga dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan, sehingga jenis tenaga kesehatan yang dipersyaratkan untuk fasilitas kesehatan dapat terpenuhi, sehingga mendukung menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- Tingginya tingkat pendidikan masyarakat Kota Banjarbaru memberi peran penting untuk masyarakat sendiri secara mandiri menjaga kualitas hidup sehari-hari

Tabel 3.21

Rekapitulasi Kunjungan Orang Dengan Masalah Kesehatan/  
Pasien Baru Tahun 2023 Pada Fasyankes

NO	FASYANKES	JUMLAH KUNJUNGAN BARU
1	PUSKEMAS	34.280
2	RUMAH SAKIT	51.933
TOTAL		67.352
	JUMLAH PENDUDUK SASARAN TAHUN 2023	286.800
	ANGKA KESAKITAN	12,79%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Indikator Angka Kesakitan Di Kota  
Banjarbaru TH. 2021 Sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kesakitan	12%	158,6%	24%	111,4%	12,79%	148,83%

Pencapaian kinerja indikator angka kesakitan tahun 2023 di Kota Banjarbaru mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 148,82%, dengan angka kesakitan 12,79%.

Dilihat dari angka kesakitan 2021 sampai dengan 2023 ini mengindikasikan kembali penurunan angka kesakitan dengan capaian kinerja nya masih sangat baik.

## 3. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten / Kota / Provinsi.

Realisasi angka kesakitan di beberapa kabupaten/kota yang mengelilingi Kota Banjarbaru dan provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat dibandingkan karena belum diperoleh data.

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Capaian Indikator Angka Kesakitan**  
**Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi**  
**Th. 2023**

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Angka Kesakitan	12,79%	N/A	N/A	N/A	N/A

#### 4. Perbandingan realisasi dengan target Renstra

**Tabel 3.24**  
**Capaian Indikator Angka Kesakitan Kota Banjarbaru**  
**Dibandingkan Dengan Target Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra
1.	Angka Kesakitan	12,79 %	20%

Capaian angka kesakitan tahun 2023 di Kota Banjarbaru 12,79% telah mencapai target yang ditetapkan di akhir Renstra yaitu sebesar 20%. Keberhasilan dalam menurunkan angka kesakitan harus tetap dipertahankan sehingga mampu dapat ikut mendukung pencapaian akhir Renstra dan RPJMD selain itu adanya faktor-faktor penyebab kesakitan yang sulit dikendalikan diantaranya *Agent* (penyebab kesakitan) dan *Environment* (lingkungan).

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2023 pada indikator menurunkan Angka Kesakitan didukung melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan yang mendukung dengan pagu anggaran Rp. 26.222.444.794 Sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi

sebesar Rp. 23.097.393.897 atau 88,1% dengan pencapaian kinerja sebesar 114%. Tidak ada upaya refocusing anggaran sebagai upaya pencapaian target indikator.

Tabel 3.25  
Anggaran Yang Menunjang Indikator Angka Kesakitan  
Th. 2023

N O	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>			
1.	<i>- Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.658.237.044	22.654.461.147	3.003.775.897
2.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	128.640.000		
3.	<i>Kegiatan Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	236.958.000	160.563.000	76.395000
	Jumlah	26.222.444.794	23.097.393.897	3.125.050.897

## 6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan di antara nya:

- Kemudahan akses pelayanan Kesehatan bagi penduduk Kota Banjarbaru, antara lain
  - 1) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah (Puskesmas) minimal 1 (satu) Puskesmas dan terakreditasi di tiap kecamatan telah terpenuhi;
  - 2) Penyediaan pelayanan home care Puskesmas bagi Masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses pelayanan



di Puskesmas Induk atau Puskesmas Pembantu;

3) cakupan universal health coverage (UHC) Kota Banjarbaru sebesar 96% yang memberikan jaminan pembiayaan Kesehatan bagi penduduk Kota Banjarbaru; dan

4) tersedianya 1 (satu) rumah sakit milik pemerintah daerah, 2 (dua) rumah sakit TNI dan 6 (enam) rumah sakit milik swasta yang telah terakreditasi dan mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi penduduk Kota Banjarbaru.

- Pelaksanaan promosi kesehatan oleh seluruh Puskesmas seKota Banjarbaru
- Pelaksanaan upaya preventif meliputi :
  - (1) Sistem kewaspadaan dini dan respon KLB yang selalu tepat waktu dan lengkap
  - (2) deteksi dini kesehatan bagi seluruh kelompok umur penduduk; dan
  - (3) penyediaan dan pelaksanaan pemberian imunisasi dasar & tambahan bagi bayi, balita & anak sekolah

Hambatan pencapaian program untuk menunjang menurunkan angka kesakitan

- Masih rendahnya capaian deteksi dini kesehatan karena masyarakat cenderung mendatangi fasilitas pelayanan Kesehatan hanya saat sakit atau berobat;
- Masih perlunya peningkatan kordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan angka kesakitan; dan
- Perlunya penyederhanaan dan sistem pencatatan pelaporan terpadu dan terintegrasi pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta sehingga

data pasien & pelayanan kesehatan akurat serta mudah diakses oleh pemangku kebijakan.

Untuk peningkatan penurunan angka kesakitan perlu upaya tindak lanjut :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik kesehatan dan non kesehatan;
- Pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan;
- Peningkatan akses kunjungan sehat ke fasilitas kesehatan;
- Pelaksanaan rekam medik elektronik yang terintegrasi dengan Satu sehat oleh seluruh fasilitas kesehatan;
- Kordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor terus dijalin dan ditingkatkan sehingga masalah kesehatan dideteksi dan diatasi bersama;
- Promosi kesehatan yang inovatif dan berkesinambungan agar tercipta budaya sehat di masyarakat; dan
- Peningkatan sistem kewaspadaan dini & respon oleh setiap fasilitas kesehatan sehingga masalah kesehatan tidak meluas

Adapun Faktor pendukung tercapainya peningkatan kinerja penurunan angka kesakitan antara lain :

- Tersedianya fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut yang mencukupi di wilayah kota Banjarbaru
- Cakupan Kepesertaan JKN Kota Banjarbaru >95%
- Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan
- Pelaksanaan surveilans aktif penyakit menular dan tidak menular.

Gambar. 3.11 Pelaksanaan Kegiatan Homecare



Gambar. 3.12 Pelaksanaan Kegiatan Deteksi Dini Kesehatan



Gambar. 3.13 Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi COVID 19



### **Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu : **Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**

Indikator ini bila tercapai memiliki makna terpenuhinya salah satu persyaratan penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan terpenuhinya standar jenis tenaga Kesehatan ini diharapkan dapat melaksanakan pelayanan Kesehatan berkualitas sesuai dengan kompetensinya. Indikator ini diukur dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah puskesmas Yang memiliki minimal 9 tenaga Kesehatan sesuai standar Permenkes no. 43 tahun 2019}}{\text{jumlah puskesmas seluruhnya}} \times 100\%$$

Adapun capaian Kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- ✚ Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan

## 1. Perbandingan Realisasi dan Target

Capaian kinerja indikator kinerja Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Indikator Persentase Puskesmas Yang Memiliki 9 (Sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan Di Kota Banjarbaru Th. 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	100%	100%	100%

Realisasi indikator persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan tahun 2023 di Kota Banjarbaru adalah 100% dengan demikian berarti telah semua Puskesmas di Banjarbaru memenuhi persyaratan memiliki minimal 9 (Sembilan) jenis tenaga kesehatan, mencapai target yang telah ditetapkan Kota Banjarbaru yaitu 100%. Capaian kinerja untuk realisasi indikator kinerja ini adalah 100% atau dengan kategori “**Baik**”

Berdasarkan laporan Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya kesehatan pada sub koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, bahwa Puskesmas di Kota Banjarbaru semua telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan minimal, dan bahkan ada 7 Puskesmas yang telah memiliki lebih dari 9 jenis tenaga kesehatan minimal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.27

Tabel 3.27  
Validasi Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan Yang Dimiliki Puskesmas  
Di Kota Banjarbaru Tahun 2023

STANDAR PERMENKES PUSKESMAS 43 TAHUN 2019

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	SESUAI STANDAR (Puskesmas Valid )		BELUM SESUAI STANDAR (Puskesmas Valid)		
			JUMLAH	%	JML PUSK < STANDAR (Puskesmas Valid)		KEKURANGAN NAKES (Orang)
					JUMLAH	%	
1	Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer	41	10	100	0	0	0
2	Dokter Gigi	15	10	100	0	0	0
3	Perawat	110	10	100	0	0	0
4	Bidan	152	10	100	0	0	0
5	Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	43	10	100	0	0	0
6	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	24	10	100	0	0	0
7	Tenaga Sanitasi Lingkungan	33	10	100	0	0	0
8	Nutrisionis	34	10	100	0	0	0
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	40	10	100	0	0	0
10	Tenaga Administrasi Keuangan	28	10	100	0	0	0
11	Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	6	4	40	0	0	0

Jumlah Puskesmas yang telah melengkapi data (Puskesmas Valid): 10 dari 10

\* Data diatas diambil dari puskesmas yang telah melengkapi data tingkat dan jenis fasyankes (Puskesmas valid)



Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan telah dibuat dalam dokumen rencana kebutuhan tenaga kesehatan. Sehingga menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan menjadi tenaga kesehatan dalam pengusulan calon ASN. Tentunya komitmen pemerintah kota Banjarbaru dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan memenuhi jenis tenaga kesehatan. Kota Banjarbaru sebagai daerah perkotaan menjadi ketertarikan tersendiri untuk menjadi tujuan kerja dari sebagian besar orang di Kalimantan Selatan, belum lagi banyaknya perkantoran instansi vertical dan perkantoran provinsi yang ada di Banjarbaru sehingga banyaknya tenaga kesehatan yang pindah dari daerah lain karena suami/istrinya bekerja pada tempat-tempat tersebut.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Realisasi capaian indikator persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan pada tahun dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28  
Capaian Kinerja Indikator Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Kota Banjarbaru TH. 2021 Sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	100%	110%	100%	100%	100%	100%

Dilihat dari tabel diatas, di tahun 2021 indikator persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan telah terpenuhi yaitu sebesar 110%. Dan realisasi capaian kinerja di tahun 2023 ini capaian kinerja mencapai 100%, dari segi

persentase sepertinya terjadinya penurunan namun dari segi jumlah absolut sebenarnya adalah tetap yaitu 10 puskesmas. Perbedaan persentase ini hanya dikarenakan perbedaan target indikator, pada tahun 2021 ditargetkan 9 Puskesmas dari 10 puskesmas, sedangkan di tahun 2022 dan tahun 2023 ditargetkan 10 Puskesmas dari 10 puskesmas.

### 3. Perbandingan kinerja dengan kabupaten / kota / provinsi.

Tabel 3.29  
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Puskesmas Yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Kota Banjarbaru Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	100%	100%	86,36%	100%	89,63%

Perbandingan realisasi indikator persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan pada beberapa kabupaten kota yang mengelilingi Kota Banjarbaru telah mencapai 100% yaitu terpenuhi Puskesmasnya memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib ada di Puskesmas.

### 4. Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

Dibanding dengan target akhir renstra tahun 2026, realisasi capaian indikator persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan telah mencapai target, sebagai mana target Renstra tahun 2026 yaitu 100%.



**Tabel 3.30**  
**Capaian Indikator Persentase Puskesmas Yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan Target Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra Th. 2026
1.	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	100%	100%

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan tahun 2023 didukung melalui program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2023 dengan pagu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan anggaran Rp. 2.311.680.300 terealisasi sebesar Rp. 1.891.944.200 atau 81,8%. Tidak ada upaya refocusing anggaran sebagai upaya pencapaian target indikator.

Tabel 3.31  
 Anggaran Program Penunjang Pencapaian Indikator Persentase  
 Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Th. 2023

N O	PROGRAM	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>			
1.	<i>Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	<i>21.000.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>0</i>
2.	<i>Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</i>	<i>1.161.230.000</i>	<i>1.020.365.000</i>	<i>140.865.000</i>
3.	<i>Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.129.450.300</i>	<i>850.579.200</i>	<i>278.871.100</i>
	Jumlah	2.311.680.300	1.891.944.200	419.736.100

## 6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan diantaranya:

- Pelaksanaan uji kompetensi untuk tenaga Kesehatan
- Analisis pemetaan tenaga Kesehatan pada dokumen rencana kebutuhan Sumberdaya manusia Kesehatan
- Pelayanan perizinan praktek tenaga Kesehatan terintegrasi dengan PTSP kota Banjarbaru
- Bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan selatan dalam hal peningkatan kapasitas petugas kesehatan

Hambatan pencapaian program :

- Pembuatan perizinan praktek tenaga kesehatan melalui website dan jika jaringan tidak lancar maka pembuatan Surat Izin Praktek (SIP) terhambat.
- Pelathan tenaga Kesehatan yang terstandar membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan alokasi dana untuk pelatihan sangat kecil
- Kwantitas dan Kualitas SDM yang menangani Sumberdaya Manusia Kesehatan sangat kecil

Tindak Lanjut :

- Penguatan Jaringan Internet untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan
- Memaksimalkan pendanaan alokasi khusus non Fisik untuk pelaksanaan beberapa pelatihan teknis yang butuhkan unuk program Kesehatan

Gambar 3.14 Pelaksanaan Kegiatan UKOM dan Pelatihan



#### Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan Dan Makanan Minuman Sesuai Standar

Pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu : **Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar**

Makna indikator ini menunjukkan Tingkat Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM telah memenuhi standar Kesehatan

Tercapainya indikator ini memberikan jaminan keamanan kesehatan bagi penduduk yang menggunakan produk yang dihasilkan.

Perhitungan indikator ini dihitung berdasarkan :

$$\frac{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan}}{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang Terdaftar}} \times 100\%$$

Adapun capaian Kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut :

✚ **Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar**

##### 1. Perbandingan Realisasi dan Target

Tabel 3.32

Capaian Kinerja Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar Di Kota Banjarbaru Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar	Persen	99%	99%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penyelenggara kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 99% dari target yang ditetapkan 99%. Dengan pencapaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori “Baik”. Indikator kinerja kefarmasian, alat kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru yang telah mendukung tercapainya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33  
Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM Yang Memenuhi Standar Di Kota Banjarbaru Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Yang Terdaftar	Yang memenuhi Standar Kesehatan	% yang memenuhi standar Kesehatan
1.	Penyelenggara Kefarmasian	38	38	100%
2.	Penyelenggara Alat Kesehatan	1	1	100%
3.	Penyelenggara TFU	1290	1262	98%
4.	Penyelenggara TPM	1.837	1.803	98,15%

Penyelenggara kefarmasian dan alat kesehatan yang mendapatkan izin penyelenggaraannya di Kota Banjarbaru apabila telah mendapatkan rekomendasi kesesuaian standar kesehatan untuk penyelenggaraan, selanjutnya dilakukan pengawasan berkala sehingga standar kesehatan yang dipersyaratkan tetap terpenuhi, demikian juga pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan tempat pengelolaan makanan (TPM) pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berkala dan syarat memenuhi standar kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan laik sehat.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Pencapaian persentase penyelenggara kefarmasian, alat kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru, dari tahun 2021 sudah mencapai target yaitu 98% dan di tahun 2022 sampai tahun 2023 99% demikian pula dengan capaian kinerjanya.

Tabel 3.34  
Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM Yang Memenuhi Standar Di Kota Banjarbaru TH. 2021 Sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar	98%	100%	99,37%	100,4%	99%	100%

## 3. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten/Kota / Provinsi.

Capaian persentase penyelenggara kefarmasian, alat kesehatan, TFU dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru tidak dapat dibandingkan dengan dengan kabupaten/kota disekitar Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan karena belum diperoleh data tersebut.

Tabel 3.35  
Perbandingan Capaian Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Al Kes, TFU & TPM yang memenuhi standar	99%	NA	NA	NA	NA

#### 4. Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra.

Tabel 3.36  
Capaian Indikator Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar Di Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra Th. 2026
1.	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar	99%	100%

Pencapaian persentase penyelenggara kefarmasian, alat kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru tahun 2022 hampir mencapai target akhir Renstra tahun 2026 yaitu 99% dari target tahun 2026 adalah 100%. Untuk mencapai hal tersebut yang harus diupayakan lagi adalah pencapaian target penyelenggaraan TFU dan TPM.

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.37  
Anggaran Program Pencapaian Indikator Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM Di Kota Banjarbaru Th. 2023

N O	PROGRAM	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	393.926.000	350.638.000	43.228.000
Jumlah		393.926.000	350.638.000	43.288.000

Untuk pelaksanaan mencapai sasaran meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman



sesuai standar ditunjang dengan Pagu anggaran Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp. 393.926.000 dengan realisasi keuangan 89%, atau sebesar 350.638.000 . Program ini dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 11% dari capaian kinerja yang mencapai 100%

#### 6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan diantaranya:

- Menyusun rencana kegiatan visitasi pemenuhan izin sarana setelah permohonan izin diteruskan oleh DPMPTSP kota Banjarbaru
- Penerbitan surat rekomendasi setelah pelaksanaan visitasi dan pemohon melengkapi persyaratan.

Hambatan dalam pencapaian program :

- Masih ada beberapa fasilitas kesehatan yang belum / lambat memenuhi persyaratan perijinan sehingga petugas perlu melakukan survei/ visitasi ulang
- Keterbatasan petugas yang kompeten dalam perizinan sarana

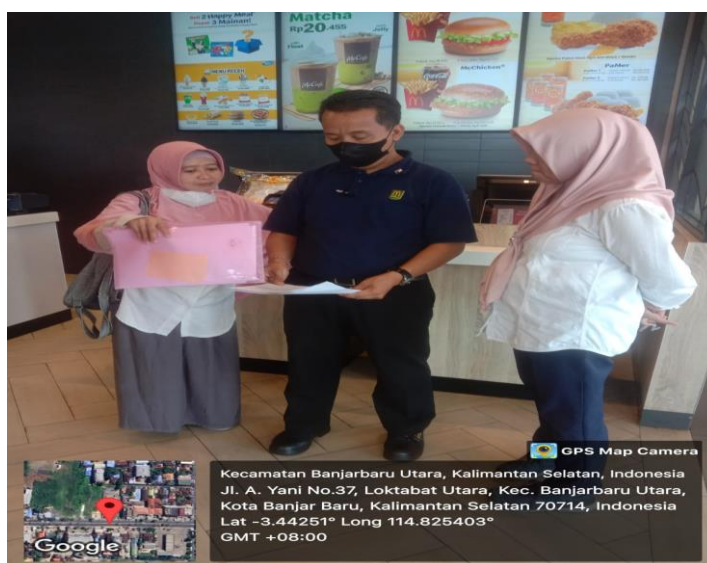
Tindak Lanjut :

- Verifikasi pemenuhan persyaratan diupayakan dilakukan sebelum pelaksanaan survei/visitasi sehingga kekurangan pemenuhan persyaratan perijinan dapat diminimalisir
- Penyediaan sumber daya pemeliharaan sarana & prasarana
- Melaksanakan sosialisasi persyaratan izin sarana
- Peningkatan kompetensi petugas pelaksana visitasi pemenuhan komitmen izin sarana

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja :

- Tingginya kepedulian masyarakat menerapkan prinsip hygiene sanitasi di sarana TPM dan TFU.
- Kegiatan monitoring dan pembinaan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas berjalan dengan baik.

Gambar 3.15  
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan PIRT



### Sasaran 5 : Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM Yang Mendukung Kesehatan

Pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu : **Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan**

Indikator ini di tetapkan dengan harapan penerbitan kebijakan dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan pada setiap kebijakan yang diterbitkan. Dengan pencapaian indikator ini mempunyai makna setiap penerbitan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu memperhatikan aspek Kesehatan

Indikator ini dapat dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan berwawasan kesehatan yang di implementasikan}}{\text{Jumlah kebijakan berwawasan kesehatan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Adapun capaian Kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut :

✚ **Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan**

1. **Perbandingan Realisasi dan Target**

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	Persen	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan di Kota Banjarbaru dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Dengan pencapaian ini capaian kinerja adalah 100% atau dengan kategori “**Baik**”.

Berdasarkan rekapitulasi Subkoordinator Promosi kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, tercatat ada 4 (empat) Kebijakan yang berwawasan kesehatan yang diterbitkan di tahun 2023 dan semuanya telah di implementasikan dengan baik. Tentunya pencapaian ini didapat dengan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mewujudkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sehingga kebijakan dibuat penerbitannya mempertimbangkan beberapa hal yang

menyangkut hajat hidup orang banyak selalu memperhatikan aspek kesehatan.

Berdasarkan data Bidang Kesehatan Masyarakat pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan ada 4 kebijakan Kesehatan yang telah ditebitkan dan di implementasikan pada tahun 2023 yaitu :

**Tabel 3.39**  
**Daftar Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru Th. 2023**

No	Nama Kebijakan	Nomor/ tanggal	Ruang Lingkup
1.	Pembudidayaan Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) Kota Banjarbaru	400/006/Kesmas/ Dinkes/2022 14 Maret 2023	Integrasi Germas
2.	Kewajiban bagi karyawan ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melakukan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	025/2023  18 April 2023	
3.	Gerakan Serentak  Banjarbaru Sapu dan Punahkan Jentik (Gertak Bapuputik) Demam Berdarah Dengue	188.45/238/KUM/2 023  6 Juni 2023	Forum Germas
4.	Pelaksanaan Gerakan Serentak Banjarbaru Sapu dan Punahkan Jentik (Gertak Bapuputik) Demam Berdarah Dengue	041/2023  13 Juni 2023	Forum Germas

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Pencapaian persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan di Kota Banjarbaru, dibanding tahun sebelumnya adalah sama, yaitu 100%.

**Tabel 3.40**  
**Capaian Kinerja Indikator Persentase Kebijakan Berwawasan**  
**Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru**  
**TH. 2021 Sd. 2023**

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 3. Perbandingan kinerja dengan kabupaten / kota / provinsi

**Tabel 3.41**  
**Perbandingan Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang**  
**Diimplementasikan Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi**  
**Th. 2023**

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%	NA	100%	100%	100%

Capaian persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan di Kota Banjarbaru dibandingkan dengan dengan kabupaten/kota disekitar Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Sebagian besar telah mencapai 100% .

### 4. Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

Pencapaian Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan di Kota Banjarbaru tahun 2023 telah memenuhi target Akhir Renstra tahun 2026 yaitu mencapai 100%.

Tabel 3.42

Capaian Indikator Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Rentra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%	100%

### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan/ Lintas Sektor dan UKBM dengan indikator persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan dengan pagu anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp. 1.102.878.700 dengan realisasi keuangan 88,6%, atau sebesar 977.779.600, tidak ada upaya refocusing anggaran sebagai upaya pencapaian target indikator.

Tabel 3.43

Anggaran Program/ Kegiatan Yang Menunjang Pelaksanaan Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan Yang Diimplementasikan Di Kota Banjarbaru Th. 2023

NO	PROGRAM	PAGU(Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>Program</i> Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.102.878.700	977.779.600	125.099.100
	Jumlah	1.102.878.700	977.779.600	125.099.100

## 6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut

Upaya promosi kesehatan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan baik itu yang sifatnya pelaksanaan advokasi, workshop, Edukasi/sosialisasi atau pun pemberdayaan, dengan media offline dan online pada tatanan rumah tangga ke masyarakat dan tatanan sekolah. Melaksanakan koordinasi kebijakan berwawasan dengan berbagai lintas bidang dan program terutama dalam hal penerapan kebijakan kesehatan agar terimplementasi dengan baik,

Tentunya dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menghambat, terutama dalam hal perubahan perilaku yang diharapkan dari terbitnya suatu kebijakan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah membuat kebijakan /regulasi /surat edaran terkait dengan tema upaya penanggulangan keluarga yang masih merokok di dalam rumah serta pengaktifan pokjanal Posyandu kelurahan dalam upaya peningkatan kinerja posyandu.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kebijakan berwawasan kesehatan antara lain adanya dukungan lintas sektor seperti Badan, SKPD, RS Negeri & Swasta, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Organisasi, yang telah mengimplementasikan 5 klaster Germas di Kota Banjarbaru.

Gambar 3.16 Tangkapan Layar Laporan Komdat

#	Jenis Kebijakan	Tipe Kebijakan	Nama Kebijakan	Nomor Kebijakan	Tgl Kebijakan	Ruang Lingkup	Dokumen	Provinsi	Pusat	Kc
1	Perbup-Perwali	Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	No. 17 Tahun 2019	28 May 2019	Kawasan tanpa Rokok	<a href="#">Download</a>	Terverifikasi	Terverifikasi	Mula
2	SE Bupati-Walikota	Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Surat Edaran Kewajiban Bagi Karyawan ASN dan Non ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Untuk Melakukan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	No. 025 Tahun 2023	18 Apr 2023	Deteksi Dini	<a href="#">Download</a>	Terverifikasi	Terverifikasi	Mula
3	Kep Bupati-Walikota	Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Surat Keputusan Pelaksanaan Gerakan Senam Banjarbaru Sapu dan Puncak Jendik (GERTAK BARUBUNTUN PEMMA)	No. 188-45/238/KUM/2023	06 Jun 2023	Pemberantasan Sarang Nyamuk	<a href="#">Download</a>	Terverifikasi	Terverifikasi	Mula

## Sasaran 6 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat

Pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu : **Prevalensi Gizi Kurang**

Tingginya prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Indonesia suatu indikasi bahwa upaya penanggulangan gizi belum optimal.

Maka dengan terdeteksinya Balita Gizi kurang, dapat segera menghindari kejadian stunting, gizi buruk dapat mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya. Lebih jauh lagi, gizi buruk dalam jangka panjang akan menyebabkan anak kurus (wasting) dan stunting. Sementara itu, stunting pada anak akan berdampak pada gangguan metabolisme, rendahnya kekebalan tubuh, dan ukuran fisik tubuh yang tidak optimal. Prevalensi Gizi kurang dihitung berdasarkan dari jumlah Balita Gizi kurang di bagi jumlah Balita yang diukur berat badannya di kali 100%.



$$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi kurang}}{\text{Jumlah Balita di ukur berat badan}} \times 100\%$$

Adapun capaian Kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut :

#### ✚ Prevalensi Gizi Kurang

##### 1. Perbandingan Realisasi dan Target

Tabel 3.44  
Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Gizi Kurang  
Di Kota Banjarbaru Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Prevalensi Gizi Kurang	Persen	7.5	7.5	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prevalensi gizi kurang di Kota Banjarbaru mendekati target yaitu sebesar 7.5% dari target maksimal 7.5% dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori **“Baik”**

Tabel 3.45  
Cakupan Penimbangan balita dan persentase Balita Gizi kurang  
(Wasting) tahun 2023 di Kota Banjarbaru

No.	Puskesmas	Jumlah balita Ditimbang	Jumlah Wasting	% Wasting
1.	Guntung Payung	609	40	6,5
2.	Guntung Manggis & Landasan Ulin Timur	753 330	53 45	7,4 13,6
3.	Liang Anggang	430	69	16,0
4.	Landasan Ulin	1.169	63	5,3
5.	Cempaka	1.403	80	5,7
6.	Banjarbaru Utara	585	28	4,7
7.	Sungai Ulin	414	23	5,5
8.	Sungai Besar	545	68	12,4
9.	Banjarbaru	1293	100	7,7
	JUMLAH	7.531	569	7,5

Dari laporan Bidang Kesehatan Masyarakat pada program Kesehatan Gizi sebagaimana pada tabel 3.58 bahwa cakupan penimbangan balita tahun 2023 sebanyak 7531 balita dan 569 diantaranya terdeteksi sebagai balita gizi kurang (wasting), sehingga capaian balita gizi kurang adalah 7.5%.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2021-2023

Capaian indikator prevalensi gizi kurang di Kota Banjarbaru Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya terjadi Penurunan prevalensi gizi kurang. Dengan kondisi ini kinerja upaya penurunan kasus gizi kurang dalam rangka pencegahan stunting semakin baik.

Tabel 3.46  
Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Gizi Kurang Di Kota Banjarbaru TH. 2021 Sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Prevalensi Gizi Kurang	14,09%	43,44%	9,1%	86,25%	7,5%	100%

## 3. Perbandingan kinerja dengan kabupaten / kota / provinsi.

Capaian indikator kinerja persentase Prevalensi Gizi Kurang di Kota Banjarbaru dibandingkan dengan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin masih lebih tinggi, namun dibanding dengan Kabupaten Banjar masih lebih rendah. Demikian juga di banding dengan prevalensi gizi kurang tingkat provinsi Kalimantan selatan prevalensi Kota Banjarbaru masih lebih tinggi. Data ini di peroleh dari laporan pengukuran dan penimbangan balita yang di input pada eppbgm.

**Tabel 3.47**  
**Perbandingan Prevalensi Gizi Kurang Dengan Kabupaten/Kota**  
**Dan Provinsi Th. 2023**

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Prevalensi Gizi Kurang	7,5%	9,6%	4,7%	2,2%	6,7%

Sumber : laporan eppbgm 2023

#### 4. Perbandingan realisasi dengan target Renstra

Pencapaian indikator prevalensi gizi kurang (wasting) tahun 2023 yaitu 7,2% dibanding dengan target akhir Renstra Th. 2026 (4%) capaian ini belum terpenuhi.

**Tabel 3.48**  
**Capaian Indikator Prevalensi Gizi Kurang Di Kota Banjarbaru**  
**Dibandingkan Dengan target Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra Th 2026
1.	Prevalensi Gizi Kurang	7,5%	4%

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat dengan indikator prevalensi Gizi kurang dengan pagu anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 4.101.628.000 dengan realisasi keuangan 78%, atau sebesar Rp. 902.110.150. Tidak ada upaya refocusing anggaran sebagai upaya pencapaian target indikator.

**Tabel 3.49**  
**Anggaran Program/ Kegiatan Yang Menunjang Prevalensi Gizi**  
**Kurang Di Kota Banjarbaru Th. 2023**

NO	PROGRAM	PAGU(Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>Program</i> Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
1.	<i>Kegiatan :</i> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	<i>Sub Kegiatan :</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i> - <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i> - <i>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>	<i>3.597.589.000</i>	<i>2.753.844.550</i>	<i>843.744.450</i>
		<i>454.039.000</i>	<i>397.173.500</i>	<i>56.865.500</i>
		<i>50.000.000</i>	<i>48.499.800</i>	<i>1.500.200</i>
	Jumlah	4.101.628.000	3.199.517.850	902.110.150

#### 6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan diantara nya:

- Pemberian PMT
- Workshop Tumbuh kembang Balita
- Pelatihan PMBA
- Kampanye ASI Eksklusif
- Perawatan Rujukan bagi Balita terdeteksi gizi kurang

Hambatan pencapaian program :

- Pola asuh dan pola makan anak
- Ekonomi keluarga

Tindak Lanjut :

- Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan
- Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi kader kesehatan
- Pengusulan PMT berbahan local
- Koordinasi dengan dinas terkait dalam hal pola asuh dan pola makan anak

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- Terpenuhiya SDM ( Tenaga Gizi )
- Peran Kader Kesehatan yang aktif
- Kesadaran keluarga dalam asupan gizi balita

Gambar 3.17 Pemberian PMT Balita Kurang dan PMT Pemulihan



Gambar 3.18 Kegiatan Aksi Bergizi Sekolah



## **Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu : **Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah**

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menggambarkan penilaian kinerja berkenaan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dapat dipertanggung-jawabkan baik keberhasilan atau kegagalan, atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan guna mencapai visi misi secara terukur dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) serta dilaksanakan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kafabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada Masyarakat.

tingkat akuntabilitas kinerja dinilai melalui evaluasi AKIP, evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Pemerintah diukur berdasarkan hasil Evaluasi dari Tim Evaluator Pemerintah Daerah. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi :

- perencanaan kinerja
- pengukuran kinerja
- pelaporan kinerja
- evaluasi kinerja internal

### 1. Perbandingan Realisasi dan Target

Tabel 3.50  
Capaian Kinerja Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah  
Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat	BB (Nilai 70-80)	A 81.05 (Nilai >80-90)	101,3%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melebihi target yaitu memperoleh predikat A (Nilai 81.05) dari target nilai BB (Nilai 70-80) dengan capaian kinerja sebesar 101.3% atau dengan kategori **“Sangat Baik”**

Pengukuran realisasi indikator Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi Pemerintah Kota Banjarbaru dengan hasil sebagai berikut :



**Tabel 3.51**  
**Pengukuran Realisasi Indikator Nilai SAKIP Berdasarkan**  
**Hasil Evaluasi Tim Evaluator Pemerintah Kota Banjarbaru, Tahun 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Internal	25	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2021-2023

Capaian indikator Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 (Nilai SAKIP Tahun 2022) dibanding tahun sebelumnya (Nilai SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021) terjadi Peningkatan Nilai dan predikat. Dengan kondisi ini kinerja penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru semakin baik.

**Tabel 3.52**  
**Capaian Kinerja Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas**  
**Kesehatan Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023**

No.	Indikator Kinerja	2021 (NILAI SAKIP 2020)		2022 (NILAI SAKIP 2021)		2023 (NILAI SAKIP 2022)	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah	BB (71,00)	100%	BB (70,50)	100%	A (81,05)	101,3%

Berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi AKIP yang dituangkan dalam surat Inspektur Kota Banjarbaru Tanggal 9 Agustus 2023, nomor: 700.1.2.1/182-LHE/INSPEKTORAT/2023. Hal : Hasil Evaluasi SAKIP SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022, rincian

hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53  
Pengukuran Realisasi Indikator Nilai SAKIP Berdasarkan  
Hasil Evaluasi Tin Evaluator Pemerintah Kota Banjarbaru,  
Tahun 2021 & 2022

Komponen/sub komponen/Kriteria		Bobot	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022
a.	Perencanaan kinerja	30	22,20	25,50
b.	Pengukuran kinerja	30	19,80	24,00
c.	Pelaporan kinerja	15	12,00	12,30
d.	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	19,25
Nilai hasil evaluasi		100	70,50	81,05
Predikat			<b>BB</b>	<b>A</b>

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mengalami peningkatan, pada tahun 2020 Nilai sebesar **71.00** (predikat BB) tahun 2021 sebesar **70,50** (predikat BB) dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai sebesar **81,05** (predikat A).

### 3. Perbandingan kinerja dengan kabupaten / kota / provinsi.

Capaian indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru memperoleh predikat sama dibandingkan dengan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten terdekat dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.54  
Perbandingan Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dengan  
Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

#### 4. Perbandingan realisasi dengan target Renstra

Pencapaian indikator Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tahun 2023 yaitu A dibanding dengan target BB pada akhir Renstra Th. 2026 capaian ini sudah terpenuhi.

Tabel 3.55  
Capaian Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra Th 2026
1.	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah	A	BB

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.56  
Anggaran Program/ Kegiatan Yang Menunjang Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Di Kota Banjarbaru Th. 2023

NO	PROGRAM	PAGU(Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>Program</i> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1.	<i>Kegiatan :</i> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364,696,000	332,170,450	32,525,550
2.	<i>Kegiatan :</i> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51,458,387,560	49,537,592,621	1,920,794,939
	Jumlah	68,179,961,132	64,868,881,587	3,311,079,545

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 68,179,961,132 dengan realisasi keuangan 95,14%, atau sebesar Rp. 64,868,881,587. Tidak ada dilakukan refocusing dilakukan untuk pencapaian Kinerja ini.

## **6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut**

### **Upaya yang telah dilakukan:**

- a. Menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP
- b. Melaksanakan evaluasi berjenjang.
- c. Pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD sangat mendukung pelaksanaan akuntabilitas

### **i. Hambatan**

- a. Belum melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
- b. Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi belum dilaksanakan.

### **ii. Rencana Tindak Lanjut**

- a. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran;
- b. Melakukan pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala;

## Sasaran 8 : Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah

Pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu : **Cakupan Pelayanan Internal Yang Di falitasi**

Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-unit lain atau kepada pegawai lain di dalam sebuah organisasi. Kualitas pelayanan internal harus baik karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pelayanan eksternalnya..

Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah menggambarkan merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mendukung meningkatnya kualitas pelayanan eksternal Dinas Kesehatan Kepada Masyarakat.

### 1. Perbandingan Realisasi dan Target

Tabel 3.57  
Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Falitasi  
Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Th. 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Falitasi	persen	100	100	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Pelayanan Internal Yang Di falitasi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru memenuhi target yaitu memperoleh nilai cakupan sebesar 100 % dari target cakupan 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori **“Baik”**

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2022-2023

Capaian indikator Cakupan Pelayanan Internal Yang Di fasilitasi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah 100% sama dengan capaian tahun 2022.

Tabel 3.58  
Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitasi  
Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru TH. 2022 Sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	2022		2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%

## 3. Perbandingan kinerja dengan kabupaten / kota / provinsi.

Capaian indikator kinerja Cakupan Pelayanan Internal Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tidak dapat dibandingkan dengan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten terdekat dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan karena tidak tersedia data.

Tabel 3.59  
Perbandingan Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitasi  
Dengan Kabupaten/Kota Dan Provinsi Th. 2023

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1.	Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitasi	100%	NA	NA	NA	NA

#### 4. Perbandingan realisasi dengan target Renstra

Pencapaian indikator Cakupan Pelayanan Internal Yang Di fasilitasi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tahun 2023 yaitu 100% dibanding dengan target 100% pada akhir Renstra Th. 2026 capaian ini sudah terpenuhi.

Tabel 3.60  
Capaian Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitasi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Dibandingkan Dengan target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra Th 2026
1.	Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitasi	100%	100%

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.61  
Anggaran Program/ Kegiatan Yang Menunjang Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitasi Di Kota Banjarbaru Th. 2023

NO	PROGRAM	PAGU(Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
	<i>Program</i> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1.	<i>Kegiatan</i> : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,516,699,900	1,447,009,762	69,690,138
2.	<i>Kegiatan</i> : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635,116,900	612,331,000	22,785,900
3.	<i>Kegiatan</i> : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,882,965,920	1,653,268,648	229,697,272
4.	<i>Kegiatan</i> : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	420,909,900	364,197,015	56,712,885

	Daerah			
5.	<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	11,691,204,952	10,713,501,312	977,703,640
	Jumlah	16,356,877,572	14,999,118,516	1,356,589,835

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah dengan indikator Cakupan Pelayanan Internal Yang Di falitasi dengan pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 16,356,877,572 dengan realisasi keuangan 91,7%, atau sebesar Rp. 14,999,118,516. Tidak ada dilakukan refocusing dilakukan untuk pencapaian Kinerja ini.

## 6. Upaya Yang Dilaksanakan, Hambatan Dan Tindak Lanjut

### Upaya yang telah dilakukan :

- a. Melakukan rekonsiliasi pencatatan aset dan persediaan internal setiap bulan.

### Hambatan

- a. Kegiatan yang sudah dilaksanakan belum terdokumentasi dengan baik;
- b. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan aset dan persediaan;
- c. Belum tersedianya aplikasi pencatatan persediaan obat.

### Rencana Tindak Lanjut

- a. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- b. Mengevaluasi kembali system pencatatan aset untuk dilakukan perbaikan pencatatan selanjutnya;



### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun Anggaran 2023, di dukung dengan anggaran APBD (P) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 129.599.153.960, namun pada bulan Desember mendapat tambahan anggaran dengan bersumber dana inflasi maka total anggaran menjadi Rp. 131.004.208.960, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.62  
Alokasi Dana Untuk Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
Tahun 2022 dan 2023

ALOKASI DANA	TERANGGARKAN
	2022
<b>Anggaran Belanja Operasi</b>	<b>96.168.278.015</b>
Belanja Pegawai	49.536.989.557
Belanja Barang dan Jasa	46.631.288.458
<b>Anggaran Belanja Modal</b>	<b>2.625.540.438</b>
<b>BTT</b>	<b>3.499.990.750</b>
<b>TOTAL ANGGARAN SKPD DINKES KOTA BANJARBARU</b>	<b>102.293.809.203</b>

*\* )Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru th 2022*

ALOKASI DANA	TERANGGARKAN
	2023
<b>Anggaran Belanja Operasi</b>	<b>109.437.214.117</b>
Belanja Pegawai	52.462.197.710
Belanja Barang dan Jasa	56.975.265.605
<b>Anggaran Belanja Modal</b>	<b>19.861.690.645</b>
<b>INFLASI</b>	<b>1.705.055.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN SKPD DINKES KOTA BANJARBARU</b>	<b>131.004.208.960</b>

*\* )Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru th 2023*

Tabel 3.63  
Alokasi Dana Program Untuk Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
Tahun 2023

ALOKASI DANA	TERANGGARKAN				%
	Anggaran		Realisasi		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	68.180.210.330	Rp.	64.868.881.587.	95%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	59.015.513.630	Rp.	52.974.914.450	89,7%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	2.311.680.300	Rp.	1.891.944.200	90,7%
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	393.926.000	Rp.	350.638.000	89%
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	1.102.878.700	Rp.	977.779.600	88,6%
<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp.	<b>131.004.208.960</b>	Rp.	<b>121.064.157.837</b>	<b>92,4%</b>

*Sumber : Subbag Keuangan Dinkes Kota Banjarbaru TA. 2023*

Pada 6 (enam) Sasaran program, serta Indikator Kinerja Sasaran pada kegiatan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 131.004.208.960,- dan terealisasi Rp 121.064.157.837,- atau 92,4%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai media akuntabilitas yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru disamping sebagai alat perbaikan *governance* dan manajemen di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Untuk tahap selanjutnya dengan LKIP ini diharapkan kepada pihak-pihak terkait dan pengambil keputusan untuk dapat memberikan umpan balik (*feed back*) kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru baik untuk perbaikan penyusunan LKIP ini sendiri di masa yang akan datang maupun untuk perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

#### 4.1 Kesimpulan

Menurut data hasil evaluasi dari Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia dengan sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat yang diukur melalui Indikator angka harapan Hidup dan angka prevalensi stunting, maka Dinas Kesehatan program yang mendukung pencapaian indikator tersebut pada 4 program utama yang dijabarkan dengan 6 sasaran program dan 8 indikator program sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun 2023 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja
  - 3 Indikator capaian kinerja diatas 100% atau dengan kategori “Sangat Baik”
  - 4 indikator capaian kinerja diantaranya diatas 75-100%, atau dengan kategori “Baik”
  - 1 Indikator capaian kinerja kurang dari 50% atau dengan kategori “Kurang”
2. Rata rata capaian kinerja seluruh indikator mencapai 90,8% atau dengan kategori kinerja **Baik**, dengan indikator yang telah mencapai target adalah 7 indikator dan yang belum mencapai target kinerja ada 1 indikator. Rata-rata capaian indikator ini meningkat dari capaian indikator tahun 2022 yang rata-ratanya 84,02%.
3. Indikator kinerja utama dinas kesehatan Kota banjarbaru yang belum tercapai adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dengan capaian kinerja 26,71%.
4. Hambatan dari tidak tercapainya indikator tersebut antara lain masih ada terjadi pernikahan usia dini, terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat membawa ke fasilitas kesehatan, terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan dan juga terlalu muda, terlalu tua dan terlalu dekat

jarak kehamilan dan terlalu banyak anak (4T).

#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas kesehatan dimasa mendatang antara lain :

1. Peningkatan cakupan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Meningkatkan sumber daya untuk pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan baik dari segi anggaran & SDM.
3. Penguatan kerjasama upaya penurunan AKI dan AKB di Puskesmas dan tim pengkaji kematian di RS pemerintah dan swasta secara bertahap.
4. Peningkatan akses kunjungan sehat ke fasilitas kesehatan.
5. Peningkatan Mutu Kompetensi untuk Tenaga Kesehatan.
6. Peningkatan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya pengetahuan ibu tentang pola asuh dan pola makan anak.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2023, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja selanjutnya.



# LAMPIRAN





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS KESEHATAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. JUHAI TRIYANTI AGUSTINA, M.MKes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H  
Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2023

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. JUHAI TRIYANTI AGUSTINA, M.MKes  
NIP.19740818 200604 2 025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023****DINAS KESEHATAN****KOTA BANJARBARU**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	100%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	7/1000 KH
		Angka Kematian Ibu (AKI)	108/100.000KH
		Angka Kesakitan	25%
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	100 %
4.	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan	99 %
5.	Meningkatnya Organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%
6.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang	7.5 %
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimal BB
8.	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%



Program Kegiatan	Pagu Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 57.610.458.630
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.311.680.300
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 393.926.000
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.102.878.700
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 68.180.210.330

Banjarbaru, Oktober 2023

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. JUHAI TRIYANTI AGUSTINA, M.MKes  
NIP.19740818 200604 2 025





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jln Palang Merah No.02 Telp./Fax (0511) 4781588 Banjarbaru, Kal-Sel  
70717 www.dinkes.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU  
NOMOR 129 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ;
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Oktober 2021

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Banjarbaru,**



**RIZANA MIRZA**

Tembusan :  
Walikota banjarbaru  
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BAN-  
JARBARU NOMOR 129 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS  
KESEHATAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 - 2026

1. Nama Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kota banjarbaru.
3. Fungsi :
  - a. Melaksanakan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular, peningkatan surveilans dan imunisasi ;
  - b. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pelayanan primer rujukan kesehatan tradisional jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang terstandarisasi dan berkompeten;
  - c. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU**  
**TAHUN 2021 - 2026**

NO.	KINERJA UTAMA/TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG-JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	<p><b>Makna Indikator :</b>                      Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan serta perlengkapannya yang memadai dan sesuai standar pelayanan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>                      Terpenuhnya sarana prasarana sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan</p> <p><b>Cara Perhitungan Indikator :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan sarana prasarana yang dalam keadaan baik}}{\text{jumlah sarana prasarana yang diselenggarakan}} \times 100\%</math></p>	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan	DINAS KESEHATAN
2.	Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	<p><b>Makna Indikator :</b>                      Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN



	<p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>          AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.</p>		
	<p><b>Cara Perhitungan Indikator :</b>  <math display="block">AKB = \frac{\text{Jumlah Kematian bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000</math></p>		
	<p><b>Angka Kematian Ibu (AKI)</b></p> <p><b>Makna Indikator :</b>          Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>          Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyediaan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyediaan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.</p>	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p>	<p>DINAS KESEHATAN</p>
	<p><b>Cara Perhitungan Indikator :</b>  <math display="block">AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000</math></p>		

	Angka Kesakitan	<p><b>Makna Indikator :</b>          Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>          untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan</p> <p><b>Cara Perhitungan Indikator :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penduduk dg keluhan Kesehatan (kuinjungan Pasien)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%</math></p>	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	DINAS KESEHATAN
3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan	

**Makna Indikator :**  
 Terpenuhinya salah satu persyaratan penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

**Alasan Pemilihan Indikator :**  
 Untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan

**Cara Perhitungan Indikator :**  


$$\frac{\text{Jumlah puskesmas Yang memiliki minimal 9 tenaga Kesehatan sesuai standar Permenkes no 43 tahun 2019}}{\text{jumlah puskesmas seluruhnya}} \times 100\%$$



4.	Peningkatan kualitasediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	<p>Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan</p> <p><b>Makna Indikator :</b> Menunjukkan Tingkat Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM telah memenuhi standar kesehatan</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Memberikan jaminan keamanan kesehatan bagi penduduk yang menggunakan produk yang dihasilkan</p> <p><b>Cara Perhitungan Indikator :</b></p> $\frac{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan}}{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang Terdaftar}} \times 100\%$ <p><b>Makna Indikator :</b> Setiap penerbitan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu memperhatikan aspek kesehatan</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Dampak terhadap kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan pada setiap kebijakan yang diterbitkan</p> <p><b>Cara Perhitungan Indikator :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Kebijakan berawawasan kesehatan yang di implementasikan}}{\text{Jumlah kebijakan berawawasan kesehatan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	
4.	Peningkatan Organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan	<p>Persentase kebijakan berawawasan kesehatan yang diimplementasikan</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	

5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang	<p><b>Makna Indikator:</b> tingginya prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Indonesia suatu indikasi bahwa upaya penanggulangan gizi belum optimal.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> dengan terdeteksinya Balita Gizi kurang, dapat segera menghindari kejadian stunting, gizi buruk dapat mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya. Lebih jauh lagi, gizi buruk dalam jangka panjang akan menyebabkan anak kurus (wasting) dan stunting. Sementara itu, stunting pada anak akan berdampak pada gangguan metabolisme, rendahnya kekebalan tubuh, dan ukuran fisik tubuh yang tidak optimal.</p> <p><b>Cara Perhitungan Indikator:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Balita Gizi kurang}}{\text{Jumlah Balita di ukur berat badan}} \times 100\%</math></p>		
----	-------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Banjarbaru,



H. RIZANA MIRZA, SH. M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660828 199303 1 007





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU**

Nomor SOP	: 002/Sekrt/2021
Tgl. Pembuatan	: 8 Oktober 2021
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	: 8 Oktober 2021
Disahkan Oleh	Kepala Dinas,  H. Rizana Mirza, S.H, M.Kes NIP. 19660828 199303 1 007
Nama SOP	<b>Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja</b>



<b>Dasar Hukum :</b> 1 UU No. 25 Th. 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional 2 PP No. 8 Th 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 3 Permenpan No: Per/19/M.PAN/11/2008, Tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja SKPD 4 Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 50 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. memahami Target kinerja 2. Memiliki kemampuan Evaluasi Kinerja
<b>Keterkaitan :</b> 1. Bidang lingkup Dinkes, Seksi	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> 1. Peraturan terkait 2. Perjanjian Kinerja 2. Komputer yang dilengkapi program Microsoft Office
<b>Peringatan :</b> 1 Apabila tidak disusun dengan baik akan menghambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan dengan optimal	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Arsip disimpan sebagai data dalam buku

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku			Ket.
		Kadis	Sekretaris	Kasubbag perencanaan Keuangan	Staf perencanaan Keuangan	Bidang/ Seksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Monitoring Evaluasi capaian Kinerja	█					Disposisi	10 menit	disposisi surat	
2	Mengarahkan Kasubbag Perencanaan Keuangan untuk menyiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja		█				Catatan Pengarahan,disposisi surat	10 menit	catatan hasil pengarahan	
3	Menugaskan Staf Untuk Menyiapkan pengumpulan data capaian kinerja			█			Catatan Pengarahan,disposisi surat	10 menit	catatan hasil pengarahan	
4	Menyiapkan Formulir Pengumpulan data capaian kinerja, dan				█		Formulir dan pedoman	1 jam	draft Formulir	
5	Menyampaikan Format Pengumpulan data dan Informasi Eavaluasi Kinerja kepada masing-masing Bidang dan seksi				█		Formulir	1 jam	DistribusiFormulir ke Seksi dan bidang	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Buku			Ket.	
		Kadis	Sekretaris	Kasubbag perencanaan Keuangan	Staf perencanaan Keuangan	Bidang/ Seksi	Kelengkapan	Waktu		Output
6	mengumpulkan hasil capaian kinerja Bidang/seksi dan melaporkan hasil pengumpulan						Laporan pencapaian kegiatan dari Bidang dan seksi	2 hari	Data Target Kinerja Dan Capaian	
7	Mengkoreksi hasil pengolahan data kinerja						Rekapitulasi	1 hari	Data Target Kinerja Dan Capaian	
8	Menyusun rencana monitoring evaluasi kinerja setiap Bidang dan Seksi						Dokumen Perencanaan	2 jam	jadwal, undangan, bahan evaluasi	
9	Melaksanakan monitoring evaluasi kinerja						Natulen	3 jam	Hasil Evaluasi	
10	Menghimpun hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja						Rekapitulasi Hasil Monev	2 jam	Rekapitulasi Hasil Evaluasi dan rencana Tindak lanjut	
11	Menganalisis data dan informasi yang terkumpul						Analisis Hasil Monev	1 hari	Draft laporan	
12	Membuat Konsep Laporan Hasil Monitoring Capaian Kinerja						Draf Dokumen Laporan hasil Monev	1 hari	Draft laporan	
13	Mengoreksi Konsep Laporan Hasil Monitoring Capaian Kinerja						Draf Dokumen Laporan hasil Monev	1 jam	Draft laporan	
14	Menyampaikan Laporan hasil Monitoring Kinerja Kepada Kadis Untuk Meminta Persetujuan						Draf Dokumen Laporan hasil Monev	1 jam	Draft laporan	
15	Penandatanganan laporan Monitoring Kinerja						Dokumen Laporan hasil Monev	10 menit	Laporan	
16	Penggandaan, Pendistribusikan dan pengarsipan						Dokumen Laporan hasil Monev	2 jam	Laporan	

**JADWAL MONITORING EVALUASI CAPAIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU**

Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Monev Triwulan I												
Monev Triwulan II												
Monev Triwulan III												
Monev Triwulan IV Tahun Sebelumnya												



Kepala Dinas,

H. Rizana Mirza, S.H, M.Kes  
NIP. 19660828 199303 1 007





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jln Palang Merah No.02 Telp./Fax (0511) 4781588 Banjarbaru, Kal-Sel 70717  
www.dinkes.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU  
NOMOR 035 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 025 TAHUN 2023 TENTANG TIM  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya peraturan Wali Kota Banjarbaru nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru perlu di lakukan penyesuaian atas perubahan kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, maka perlu untuk di lakukan perubahan nama jabatan dalam Tim Penerapan SAKIP di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;



12. Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 12 tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 025 TAHUN 2023 TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU;
- KESATU** : Perubahan jabatan dalam kedinasan susunan keanggotaan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
- KEDUA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 6 Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Banjarbaru



JUHAI TRIYANTI AGUSTINA



Lampiran Keputusan  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
Nomor 035 Tahun 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
5.	Tim Teknis	1. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian 2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga 3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi 4. Kepala Seksi Promosi & Pemberdayaan Kesehatan 5. Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular 6. Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi 7. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa 8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 9. Kepala Seksi SDM Kesehatan 10. Kepala Seksi Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 11. Staf Subbag Perencanaan Keuangan (2 Orang)

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Banjarbaru



JUHAITRIYANTI AGUSTINA